

Tantangan Polri

Oleh : Kastorius Sinaga

Penasihat Ahli Kepala Polri

1 Juli 2006 ini, Kepolisian Negara RI (Polri) genap memasuki usia 60 tahun. Perjalanan panjang dari tahun 1946 hingga sekarang ini, tentu menyimpan banyak sejarah penting perkembangan Polri. Tidak sulit untuk menunjukkan berbagai kemajuan dan perubahan yang terakhir ini, Polri dipandang sangat berhasil, khususnya dalam memberantas terorisme. Terlepas dari prestasi temporer demikian, yang perlu dipertanyakan terus menerus adalah pengembangan paradigma baru Polri.

Seiring derap reformasi, terdapat dinamika baru didalam kehidupan negara dan masyarakat kita. Berbeda dengan masa lampau, konstelasi dan aktor politik semakin berubah, beragam dan menyebar. Terdapat kesan, politik dipandang sebagai jembatan utama menuju kekuasaan. Tarik menarik kepentingan antar kelompok,

premanisme politik, intervensi antarlembaga, serta fragmentasi politik yang berkembang dalam kehidupan politik kita sehari-hari merupakan tantangan tersendiri bagi kepolisian dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum, pemelihara ketertiban, dan pengayom masyarakat.

Dalam konteks demikian, operasi dan fungsi kepolisian tidak berada dalam keadaan vakum dan steril secara politik. Bahkan seringkali dia ditarik untuk larut ke dalam kepentingan politik praktis. Arus globalisasi berikut kecenderungan liberalisasi didalamnya telah memunculkan berbagai bentuk ancaman berupa kejahatan konvensional dan transnasional yang semakin beragam dan menyebar. Rasa aman dan nyaman menjadi barang mahal bagi masyarakat kita. Sering kali komitmen dan integritas ke-

polisian sebagai pengayom masyarakat dipertanyakan, sehingga mendorong perlunya penegasan paradigma baru bahwa kepolisian lahir dan tumbuh untuk kepentingan rasa aman masyarakat. Tentu itu mendorong peningkatan kepekaan dan profesionalisme pelayanan kepolisian sehari-hari.

Tiga tugas pokok kepolisian, yaitu penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas, dan pengayoman masyarakat, dalam realitasnya adalah inti persoalan yang dihadapi bangsa kita saat ini. Bahkan ketiga isu ini merupakan muara pelaksanaan kekuasaan negara sehari-hari. Karena tiga fungsi itu pula, kepolisian menjadi aktor sentral yang dapat menentukan pola-pola baru dalam relasi antara negara dan masyarakat yang lebih demokratis, berkeadilan, dan berperikemanusiaan.***

